

# BAB I

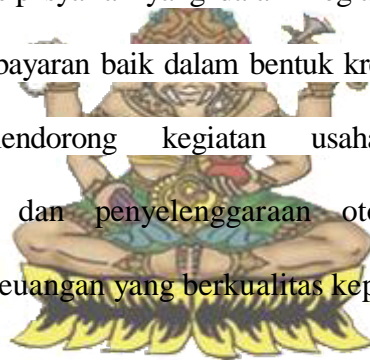
## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk memberitahukan informasi mengenai keadaan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan disusun dan disajikan selama setahun untuk memenuhi kebutuhan pihak *intern* perusahaan maupun *ekstern* perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangat berbeda dan berhak untuk memperoleh informasi keuangan. Kualitas laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan dan bagi investor laporan keuangan juga berguna dalam pengambilan keputusan. Sehingga laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak internal ataupun eksternal untuk pengambilan keputusan terkait operasional entitas atau organisasi (Pranacita, 2022).

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Menurut PSAK No.1 (Revisi 2017) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan pada mereka.

Dalam perekonomian suatu negara, industri perbankan memiliki peranan yang penting sebagai pendorong dalam pembangunan ekonomi serta sebagai sumber pembiayaan bagi masyarakat. Mengacu pada Undang-undang tentang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 1), Industri perbankan di Indonesia hanya mengenal dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. jelas dikatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran baik dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan mendorong kegiatan usaha masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan otonomi BPR yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas kepada nasabah (Shofa, 2022).



Perkembangan BPR yang sangat pesat saat ini menimbulkan persaingan dengan Bank Umum dan lembaga penyimpan dana lainnya seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD). BPR yang dipilih dalam penelitian ini adalah BPR Kabupaten Badung pada periode 2020-2022, karena Kabupaten Badung memiliki jumlah BPR terbanyak di Provinsi Bali, yaitu sebanyak 47 bank yang telah terdaftar di Bank Indonesia sampai tahun 2022. Jumlah BPR yang ada di Kabupaten Badung mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk mulai menyimpan dananya di bank. Dana yang bersumber dari masyarakat ini digunakan sebagai modal oleh bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya (Chatarine, 2014).

Kemampuan BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya tercermin dari pelaporan keuangan. Sebagai badan penyalur kredit, BPR juga memerlukan manajemen pengendalian internal yang baik sehingga dapat menjalankan usahanya secara *continue*. BPR dituntut untuk menunjukkan performa terbaiknya dalam meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menginvestasikan dananya. Selain itu, sebagai bagian dari perbankan yang sedang tumbuh BPR juga harus berhati-hati dalam menjaga keseimbangan kinerjanya dari bahaya adanya kecurangan yang mengancam dunia perbankan. Terungkapnya berbagai kasus kecurangan di sektor perbankan yang dapat merugikan nasabah maupun bank itu sendiri menunjukkan bahwa kecurangan banyak terjadi dimana saja (Widyaningtias, 2014).



Kasus yang sempat terjadi di salah satu BPR di kabupaten badung yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Legian, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.125-127 Denpasar, Provinsi Bali, dimana BPR ini mengalami kebangkrutan disebabkan oleh pemegang saham BPR yang melakukan tindakan pidana penggelapan dana operasional. Pemilik saham tersebut menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Hal yang dilakukan yaitu membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan transaksi pada kurun waktu 2017-2018 terkait transaksi sebesar kurang lebih Rp 23,1 miliar rupiah (balitribune.co.id 2022). Kasus BPR tersebut menimbulkan suatu sorotan yang mengarah pada kualitas pelaporan keuangannya.

Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan tentunya memerlukan seorang pemimpin yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik. Pemahaman akuntansi sangatlah diperlukan dalam membuat atau menyusun suatu laporan

keuangan. Dengan adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi yang baik dan handal maka kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan itu akan lebih bagus dan terhindar dari adanya kesalahan - kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman akuntansi itu sendiri (Putra, 2017). Hasil penelitian Astrayanti (2017), Purwanti dan Wasman (2014), Dewi (2018), Maulana (2017) mendapatkan hasil pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Pebriantari (2021) mendapatkan hasil pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam suatu perusahaan pemimpin menjadi penentu keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Menjadi seorang pemimpin harus memiliki etika yang baik. Seorang pemimpin yang memiliki etika akan mampu membawa organisasi yang dipimpinnya sampai ke puncak keberhasilan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada semua anggota organisasi yang dipimpin. Tanpa adanya etika kepemimpinan yang efektif mengakibatkan keseimbangan organisasi terganggu (Astrayanti, 2017).

Seorang pemimpin menjadikan etika sebagai dasar mengoptimalkan semua bakat dan potensi sumber daya manusia, dan meningkatkan nilai dari semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi serta menghargai semua kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Pentingnya etika yang dimiliki oleh seorang pemimpin akan berdampak pada efektifnya operasional usaha dan organisasi dapat berjalan dengan seimbang. Nilai tambah dalam mendorong pengembangan diri untuk meningkatkan mental dan spiritual harus dijunjung oleh pemimpin organisasi dalam menjalankan tugas etika kepemimpinannya

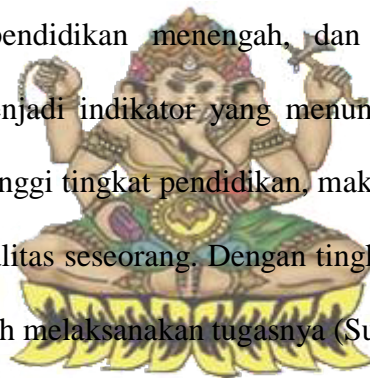
(Purba, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifa'I (2014) memperoleh hasil bahwa adanya pengaruh positif antara pengaruh etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2020) dengan memperoleh hasil bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pada suatu perusahaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan suatu perusahaan menjadi baik dan akurat adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam mewujudkan sistem perusahaan yang baik dan tepat, dibutuhkan suatu analisa dan evaluasi. Selain itu Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada BPR. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong *efisiensi* dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016).

Setiap BPR harus mempunyai Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang akan dapat merugikan perusahaan dan terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat. Penerapan sistem pengendalian internal yang kurang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan suatu perusahaan sehingga sistem pengendalian internal menjadi sangat penting dalam suatu perusahaan untuk menjaga kekayaan perusahaan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Siwambudi (2017), Puspita (2020) dan Rohman (2020) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Inasari (2018) membuktikan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan dapat menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya (Sukarini, 2019).

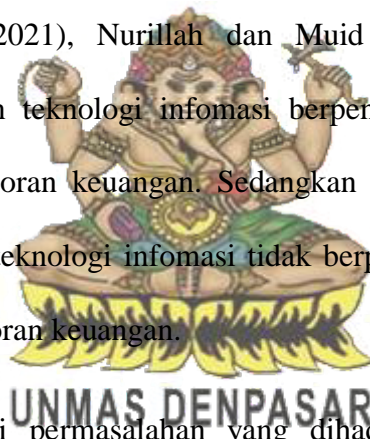


Eriva (2013), dan Priyatna (2015) menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan. Sedangkan Cahyadi (2017), Nastiti (2013) dan Maulia (2014) membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman atas laporan keuangan.

Pemanfaatan informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas (Husna, 2017). Dengan adanya

teknologi informasi perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan sistem informasi yang berupa laporan keuangan dan pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi yang sudah semakin maju dan modern. Adanya teknologi yang semakin modern dan canggih tentunya bisa memberikan kemudahan kepada organisasi dalam mempercepat proses pertanggungjawaban dan keterbukaan mengenai laporan keuangan kepada para *stakeholders*. Pemanfaatan teknologi dapat memberikan dukungan pelayanan administrasi, serta untuk membantu pengambilan keputusan.

Pebriantari (2021), Nurillah dan Muid (2014) menyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Harmoni (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.



Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi oleh BPR berdasarkan fenomena dari hasil penelitian diharapkan agar perusahaan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam aspek tingkat pemahaman akuntansi, etika kepemimpinan, sistem pengendalian internal, tingkat pendidikan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Etika Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal, Tingkat Pendidikan, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPR Di Kabupaten Badung”**.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPR di Kabupaten Badung?
2. Apakah etika kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPR di Kabupaten Badung ?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPR di Kabupaten Badung ?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPR di Kabupaten Badung?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPR di Kabupaten Badung?



## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BPR di Kabupaten Badung
2. Untuk menganalisis pengaruh etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan BPR di Kabupaten Badung
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BPR di Kabupaten Badung



4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan BPR di Kabupaten Badung.
5. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BPR di Kabupaten Badung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Bagi mahasiswa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengimplementasikan teori dan praktek yang telah didapat pada bangku perkuliahan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu hasil studi empiris untuk memberikan pemahaman, gambaran dan wawasan mengenai pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, etika kepemimpinan, sistem pengendalian internal, tingkat pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Bagi Universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah yang terkait.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi perusahaan atau lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar mampu meningkatkan kinerja dimasa yang akan mendatang. Hasil penelitian ini

dapat dijadikan acuan informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam memecahkan masalah yang ada guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi bagi manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan pada Bank Perkreditan Rakyat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori


##### 2.1.1 Teori Kelembagaan Lama (*Old - Institutional Theory*)

Teori kelembagaan atau *institutional theory* dapat didefinisikan Rinaldi (Widayawati, 2012) adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan dapat bertumbuh dan berkelanjutan ketika berada dalam lingkungan yang kompetitif yang penuh dengan para pesaing, dan perusahaan memiliki kemampuan dalam memuaskan *stakeholder*. Adanya ketidakpuasan dan rasa tidak percaya terhadap teori neoklasik sehingga menimbulkan adanya konsep kelembagaan sebagai bagian dari ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah dan hukum. Berdasarkan hal tersebut masuk kedalam inti pokok aliran ekonomi kelembagaan (Petraakis, 2020).

Terdapat dua teori yang berkaitan dengan teori kelembagaan ini yaitu teori kelembagaan lama (*old institutional theory*) dan teori kelembagaan baru (*new institutional theory*). Di dalam teori kelembagaan lama, menurut Louis (2016), dalam Nudilah (2016), mempercayai bahwa masyarakat mengidentifikasi suatu organisasi berdasar norma dan nilai yang dianut organisasi tersebut. *Old institutional theory* menurut Burn (2016), dalam Nudilah (2016) digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi dan berlangsung dalam waktu yang lama dalam suatu organisasi, obyek analisis dalam teori kelembagaan lama adalah individu

sedangkan pada teori kelembagaan baru obyek analisisnya adalah organisasi. Penelitian ini menggunakan *Old Institutional Theory* karena yang diteliti adalah karakter orang-orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan yaitu tingkat pemahaman akuntansi yang dimiliki pemimpin maupun karyawan untuk membuat suatu laporan keuangan, etika yang dimiliki pemimpin, kemudian sistem pengendalian internal dalam melakukan tugasnya, tingkat pendidikan seseorang serta bagaimana pemanfaatan teknologi informasi akuntansi di perusahaan tersebut (Sinaranata, 2019).

### 2.1.2 Tingkat Pemahaman Akuntansi



Pemahaman akuntansi sangatlah diperlukan dalam membuat atau menyusun suatu laporan keuangan. Dengan adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi yang baik dan handal maka kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan itu akan lebih bagus dan terhindar dari adanya kesalahan - kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman akuntansi itu sendiri (Putra, 2017). Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya (Maulana, 2017).

Pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami dan memahamkan, sehingga orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang

dikatakan paham terhadap akuntansi berarti mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan (Goddard, 2020).

Pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik, untuk lebih memahami akuntansi secara kompherensi, mengetahui sistem dan prosedur akuntansi, standar akuntansi yang berlaku, kebijakan akuntansi serta memahami komponen – komponen laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan (Mulia, 2014). Pendidikan akuntansi diajukan untuk mendidik mahasiswa perguruan tinggi memiliki pengetahuan dibidang akuntansi (Nuraini, 2017). Tidak adanya kualitas dalam laporan keuangan juga bisa terjadi karena kurangnya pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh *accounting* sehingga dalam membuat laporan keuangan menjadi kurang akurat. Semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh seorang *accounting* maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dibuat.

### 2.1.3 Etika Kepemimpinan

Etika adalah sebuah cabang filsafat mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Seorang pemimpin menjadikan etika sebagai dasar mengoptimalkan semua bakat dan potensi sumber daya manusia dan meningkatkan nilai dari semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi serta menghargai semua kualitas dan

kopetensi sumber daya manusia (Wedayani, 2013). Seorang pemimpin wajib untuk memimpin dengan berpondasi etika yang kuat dan santun. Pemimpin yang mempunyai etika yang baik akan berpengaruh positif bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dengan mendorong sikap dan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral yang sama, pemimpin akan menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan membangun reputasi organisasi yang kuat.

Pemimpin yang memiliki etika akan mampu membawa organisasi yang dipimpinnya sampai ke puncak keberhasilan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada semua anggota organisasi yang dipimpin. Ketika etika kepemimpinan dapat diterapkan dalam suatu organisasi, maka pegawai akan termotivasi untuk bekerja sehingga akan mendorong pelaksanaan tugas dengan tepat seperti sifat pelaporan keuangan yang akan disampaikan akan sangat bagus karena dilakukan dengan tulus (Anggreni, 2021).



Etika Kepemimpinan dapat terwujud jika pemimpin memiliki sifat jujur kepada pengikutnya, pemimpin dapat dipercaya oleh para pengikutnya sehingga pengikutnya akan merasa aman didekat si pemimpin, memiliki hubungan yang positif terhadap pengikutnya, dapat menilai dan memahami kinerja para pengikutnya, dapat bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dibebankan dengan cara menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, memiliki sifat adil, kritis, rendah hati, dan hormat kepada diri sendiri dan orang lain (Holt et al., 2018).

#### 2.1.4 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Pengendalian intern adalah alat ukur untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian manajemen akan tercapai (Setiawati, 2013). Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran untuk menjaga, mengawasi dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian internal (*internal control*) meliputi susunan organisasi dan semua cara - cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Unsur sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara konperhensif (Herawati, 2014:3).

Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pengatur sumber daya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta melihat ketelitian dan keandalan data akuntansi serta untuk menghindari adanya penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya

dan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga menilai kualitas laporan keuangan daerah diharuskan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan juga sumber kekayaan yang dimiliki oleh daerah (Fransiska, 2016:326).

Menurut Bank Indonesia Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna:

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank
- b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Terselenggaranya sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain:

- a. Dewan Komisaris Bank, mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
- b. Direksi Bank, mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern



yang ditetapkan Bank. Sementara itu Direktur Kepatuhan wajib berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

- c. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Disamping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor internal khususnya praktek dan penerapan penilaian risiko.



- d. Pejabat dan pegawai Bank wajib memahami dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya risiko (*risk culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktek perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.
- e. Pihak-pihak ekstern Bank, antara lain otoritas pengawasan Bank, auditor eksternal, dan nasabah bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif.

### 2.1.5 Tingkat Pendidikan

Sedarmayanti (2016:379) dan Hanifah (2017) berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses, teknik, dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan diri seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir. Pendidikan sebagai optimalisasi sumber daya manusia yang cenderung lebih bersifat formal menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan pengembangan kemampuan umum, yang dilakukan secara sistematis, programatis dan berjenjang, agar dapat dihasilkan manusia – manusia yang berkualitas, yang akan dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan potensi diri harkat dan martabatnya (Hendrayani, 2021).



Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan atau pendidikan formal yang telah ditempuh seseorang dari jenjang sekolah dasar maupun perguruan tinggi. Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang ditempuh selama sembilan tahun pertama pada saat awal masa sekolah. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang

ditempuh setelah pendidikan menengah usai ditempuh. Pendidikan tinggi ini mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Tingkat pendidikan dapat menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya (Sukarini, 2019).

### 2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi semakin lama semakin meningkat. Teknologi Informasi (TI) ini berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu proses pengolahan dan penyebaran data dengan memanfaatkan alat perangkat komputer dan telekomunikasi untuk kegiatan yang dilakukan seseorang. Teknologi informasi merupakan teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja baik pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut (Wansyah, 2012).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi computer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*),

perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet*) *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.


Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar. Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan yang awalnya secara manual dilihat tidak efektif dan efisien untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadinya kesalahan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan sangatlah dibutuhkan, untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat dan konsisten (Primayana, 2014).

Menurut Suarniasih (2022) pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Secara umum di jelaskan dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat ditinjau dari :

- a. Pemanfaatan perangkat (kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan).
- b. Pemrosesan dan penyimpanan (pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh), dan
- c. Perawatan (adanya jadwal pemeliharaan peralatan perangkat teknologi informasi secara teratur guna mendukung kelancaran pekerjaan).

### 2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari semua transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan dimana transaksi – transaksi dan peristiwa – peristiwa yang bersifat *financial* dicatat, digolongkan, dan diringkas dalam satuan uang (Septiana, 2017). Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya.



Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan - keputusan ekonomi. Laporan keuangan merupakan hasil atau *output* dan serangkaian proses pencatatan dan pengiktisaran atau transaksi transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan artian dari pengkomunikasian informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan (Gotama, 2022). Laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik sehingga dapat menyediakan informasi – informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Menurut Djarwanto dan Saraswati (2012) terdapat tiga bentuk laporan keuangan pokok yang dihasilkan oleh perusahaan secara umum, yaitu:

### 1. Neraca

Neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Neraca dapat digunakan sebagai gambaran potret kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu (*snapshot* keuangan perusahaan), yang meliputi aset sumber daya perusahaan dan klaim atas aset tersebut meliputi utang dan saham pribadi. Aset perusahaan menunjukkan keputusan penggunaan dana atas keputusan investasi pada masa lalu. Dengan demikian, neraca yaitu menampilkan keseimbangan antara keputusan investasi dengan keputusan pendanaan (Sinaranata, 2019).

### 2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Berbeda dengan neraca yang merupakan *snapshot* maka laporan laba rugi hanya mencakup kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu saja.



### 3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai aliran kas yang masuk maupun keluar bersih pada suatu periode waktu yang merupakan hasil dari tiga kegiatan pokok perusahaan yaitu, operasional, investasi, dan pendanaan (Yanti, 2019). Laporan keuangan harus dapat menyajikan informasi – informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat memberikan pemahaman dan informasi lebih tentang manajemen dan kondisi perusahaan itu sendiri.

### 2.1.8 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Industri perbankan di Indonesia hanya mengenal dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Mengacu pada Undang-undang tentang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 1), jelas dikatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2016:3) menyatakan Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dan tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Sedangkan bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran baik dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan mendorong kegiatan usaha masyarakat. Terutama untuk disalurkan pada usaha retail dan kredit kecil. BPR juga identik sebagai bank yang melayani pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang lokasinya tak jauh dari jangkauan BPR. Bentuk badan hukum BPR yang diijinkan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Perusahaan Daerah (PD). Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris (Amalia, 2014).

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD

1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism, etatisme, dan monopoli*) (Amalia, 2014). Usaha – usaha BPR yang disebutkan dalam UU No.10 Tahun 1998 pasal 13 tentang kegiatan usaha BPR adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over likuiditas* (Arrifuddin, 2012).

BPR memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan otonomi BPR yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas kepada nasabah (Shofa, 2022). Proses pendirian BPR harus melalui tahapan izin prinsip dan izin usaha/izin operasional. Izin prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR (Pasal 5 PBI No.8/26/PBI/2006), sedangkan izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan yang dimaksud dalam izin prinsip selesai dilakukan.



## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Yuliani, (2014) meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Banda Aceh”. Variabel independennya dalam penelitian ini adalah pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan peran internal audit serta variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Muzahid (2014) meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Kerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara”. Variabel independen tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, lama pengalaman kerja dan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan lama pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap pemahaman atas laporan keuangan.

Priyatna (2015) meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, dan Pengalaman Kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis yang digunakan yaitu

teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Harlinda (2016) meneliti tentang “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau”. Variabel indevendennya yaitu sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, dan teknologi informasi serta variabel devendennya yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Riau.

Nudilah (2016) meneliti tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan dan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Denpasar. Variabel indeviden dalam penelitian ini adalah etika kepemimpinan dan tingkat pemahaman akuntansi serta variabel devendennya yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kepemimpinan dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Septiana (2017) meneliti tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas dan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap

pengambilan keputusan pelaporan keuangan pada LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Variabel independennya dalam penelitian ini adalah etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi serta variabel dependennya dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Putra dan Gunandi (2017) meneliti tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan dan Fungsi Badan Pengawas terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD. Variabel independennya adalah etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas serta variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian tersebut menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Inasari (2018) meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Sukoharjo”. Variabel independen yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintah dan peran auditor internal serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, sedangkan penerapan sistem pengendalian internal dan peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Lisnawati (2019) meneliti tentang “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar”. Variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi, sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Gianyar.

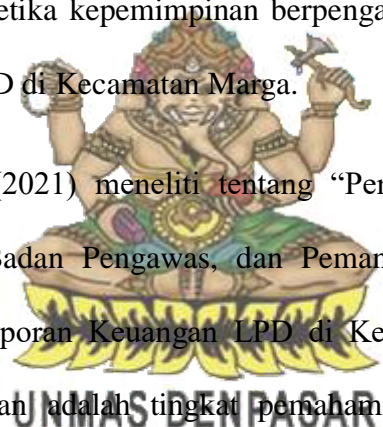
Rohman, (2020) meneliti tentang “Peran Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang”. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan sumber daya manusia, Standar akuntansi pemerintah, Pemanfaatan teknologi informasi, Pengendalian intern dan

Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Priyani, (2020) meneliti tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Pengalaman Kerja dan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa LPD di Kota Denpasar. Variabel independen yaitu etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, pengalaman kerja, dan tingkat pemahaman akuntansi, sedangkan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan etika kepemimpinan dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas dan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar.

Pramesti (2020) meneliti tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan dan Fungsi Badan Pengawas, Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi”. Variabel independennya etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Variabel dependen kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan pendidikan, pengalaman kerja, dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Pratiwi (2021) meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, *Professionalisme* dan Etika Kepemimpinan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Marga”. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, *professionalisme* dan etika kepemimpinan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman akuntansi dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan *professionalisme* dan etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Marga.



Pebriantari (2021) meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD di Kecamatan Gianyar”. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan, fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kecamatan Gianyar.